



## Implikasi Kebijakan Brexit terhadap Kerentanan Pangan di Inggris

Arditta Pramesti<sup>1</sup>, Gili Argenti<sup>2</sup>, Nurbani Adine Gustianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 05 November 2025  
Revised: 17 November 2025  
Accepted: 28 November 2025

*Brexit or Britain Exit policy is a policy implemented by the United Kingdom government in deciding to leave the European Union. This policy was taken based on a referendum held in 2016. However, in its implementation, many dynamics occurred. One of them is the severe food vulnerability that hit the United Kingdom in the years after the Brexit policy was taken. This study aims to determine the dynamics experienced by the United Kingdom after the Brexit policy was implemented, especially in the field of food security. To analyze this phenomenon, non-traditional security theory is used. This theory is relevant to the implications of Brexit which have an impact on food vulnerability in the United Kingdom. The type of research used in this journal is descriptive, using a qualitative approach method. The results obtained from this study are that the Brexit policy decided by the United Kingdom actually has many challenges in all sectors, one of which is the food sector. Moreover, there are external problems that occur, namely turmoil in the European regional area.*

**Keywords:** *Brexit Policy, Food Vulnerability, Non-traditional Security, European Region, United Kingdom.*

(\*) Corresponding Author: [2110631260015@student.unsika.ac.id](mailto:2110631260015@student.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Pramesti, A., Argenti, G., & Gustianti, N. (2025). Implikasi Kebijakan Brexit terhadap Kerentanan Pangan di Inggris. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 1-14. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12063>.

---

### INTRODUCTION

Dalam peta geografis, benua Eropa adalah satu bagian dari beberapa negara di Asia atau yang bisa disebut dengan Eurasia. Letak geografis Benua Eropa yakni 36° Lintang Utara (LU) hingga 71° LU dan 9° Bujur Barat (BB) hingga 66° Bujur Timur (BT). Benua Eropa memiliki batas-batas dengan Benua lainnya, seperti di Utara dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Bagian Selatan dengan Benua Afrika, Laut Hitam, dan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Lalu di Timur, Eropa berbatasan dengan Benua Asia, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Selat Bosporus. Sedangkan di Barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa adalah salah satu benua dengan luas wilayah terkecil di dunia. Benua Eropa membujur dari bagian barat ke timur sejauh 5.300 km dan melintang sejauh 3.950 km dan memiliki luas 10.900.000 km persegi.

Sebagian besar negara di Benua Eropa tergolong sebagai negara maju jika menurut ketentuan dari *International Monetary Fund* (IMF). Digolongkan negara maju karena pendapatan perkapita yang tinggi yang diharapkan membuat negara tersebut makmur dan memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Selain itu, negara maju juga menonjol dalam industrialisasi, memiliki basis ekspor yang bervariasi, dan mempunyai sektor keuangan yang terintegrasi ke dalam sistem keuangan global

(Pristiandaru, 2022). Beberapa contoh negara maju di benua Eropa yaitu, Norwegia, Swiss, Denmark, dan Inggris.

Sebagai implementasi untuk mengeratkan kerja sama pada bidang ekonomi, sosial, serta keamanan di kawasan regional, Eropa membentuk organisasi internasional yang bernama Masyarakat Eropa. Awalnya terbatas untuk kawasan Eropa Barat, tetapi mereka akhirnya melakukan ekspansi gencar ke Eropa Timur dan Tengah pada awal abad 21. Pada tahun 1993 dengan diratifikasinya perjanjian Maashtrich, Masyarakat Eropa berubah nama menjadi Uni Eropa. Hal ini bertujuan untuk mempertegas identitas Eropa atas negara anggotanya, juga memperkokoh integrasi Eropa (Dastanta, 2009: 6).

Uni Eropa memiliki tiga pilar utama, yakni: kerangka kerja masyarakat Eropa, kerjasama kebijakan luar negeri, dan kerjasama dalam bidang hukum serta masalah-masalah dalam negeri (Dastanta, 2009). Pesatnya perkembangan yang dicapai oleh Uni Eropa didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik. Keberhasilan Uni Eropa dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan politik menjadi daya tarik yang besar bagi banyak negara. Mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi negara anggota (Ikhsan, 2019).

Tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal (EURO). Untuk hubungan eksternal keluar, tujuan utama Uni Eropa adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional, khususnya kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk pembangunan kebijakan pertahanan Bersama ([hubunganinternasional.com](http://hubunganinternasional.com), 2021).

Uni Eropa memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin bergabung menjadi anggota, yang disebut sebagai kriteria Kopenhagen. Kriteria akses atau kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan Eropa di Kopenhagen sejak tahun 1993, adalah syarat-syarat penting yang harus dipenuhi oleh negara-negara kandidat untuk menjadi negara anggota. Syarat yang pertama, kriteria Politik dimana stabilitas lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan serta perlindungan terhadap minoritas. Kedua, kriteria Ekonomi, adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa. Lalu, yang Ketiga adalah kriteria Acquis, berkomitmen terhadap hak dan kewajiban yang mengikat semua negara anggota Uni Eropa, diantaranya bersedia taat kepada Undang-Undang Uni Eropa dan menjadikan hukum Uni Eropa sebagai bagian dari undang-undang nasional mereka (European Commission, 2018).

Saat ini organisasi tersebut telah memiliki 27 negara anggota (Ensiklopedia Britannica). Negara yang telah gabung yaitu, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia (European Union, 2022). Sebelumnya terdapat 1 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, yaitu Inggris atau Britania Raya yang akhirnya pada 1 Februari 2020 memutuskan untuk keluar (Hadijah Alaydrus, 2020).

Inggris adalah negara yang secara astronomis terletak di antara 50° Lintang Utara (LU) hingga 60° Lintang Utara (LU) dan 8° Bujur Barat (BB) hingga 2° Bujur Timur (BT). Secara geografis, Britania Raya atau biasa disebut Inggris, berada di lepas pantai barat Eropa yakni diantara Samudera Atlantik dan Laut Utara. Di utara, Inggris berbatasan dengan Samudera Atlantik, Bagian selatan berbatasan dengan Selat Channel. Di timur berbatasan dengan Laut Utara, dan bagian barat berbatasan dengan Samudera Atlantik. Mereka memiliki luas negara 242,945 sq km dengan populasi sebanyak 68,766,027 per 23 Desember 2022, berdasarkan elaborasi Worldometer dari data terbaru PBB (Worldometer, 2022).

Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia dan karena itu Inggris dikategorikan sebagai salah satu negara maju. Pada tahun 2021, *Gross Domestic Product* (GDP) Inggris berjumlah sekitar 2,2 triliun pound Inggris, 2,04 triliun pound pada tahun 2020, dan 2,26 triliun pada tahun 2019 (D. Clark, 2022). Inggris menerapkan sistem ekonomi pasar campuran yang mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip pasar bebas, namun tetap mempertahankan infrastruktur kesejahteraan sosial.

Sebagai salah satu anggota, Inggris diberi berbagai kemudahan oleh Uni Eropa yaitu (1) kebebasan masyarakat Inggris untuk tinggal, bekerja dan pensiun di berbagai negara Uni Eropa, (2) terciptanya lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Inggris kaitannya dengan kerjasama ekspor antara Inggris dengan Uni Eropa, (3) adanya fasilitas penunjang bagi warga negara Inggris yang bepergian atau liburan di berbagai negara Uni Eropa seperti jaminan kesehatan, (4) adanya perlindungan konsumen bagi masyarakat Inggris yang belanja di negara Uni Eropa lainnya kaitannya dalam kualitas dan keamanan produk, (5) koordinasi dan kerjasama antar negara anggota Uni Eropa dalam menjaga keamanan masyarakat Uni Eropa dari teroris, pedofil, perdagangan manusia dan kejahatan *cyber*, (6) pengaruh positif dari Uni Eropa pada kegiatan bisnis masyarakat Inggris (Springford, John, Tiford, & Whyte, 2014).

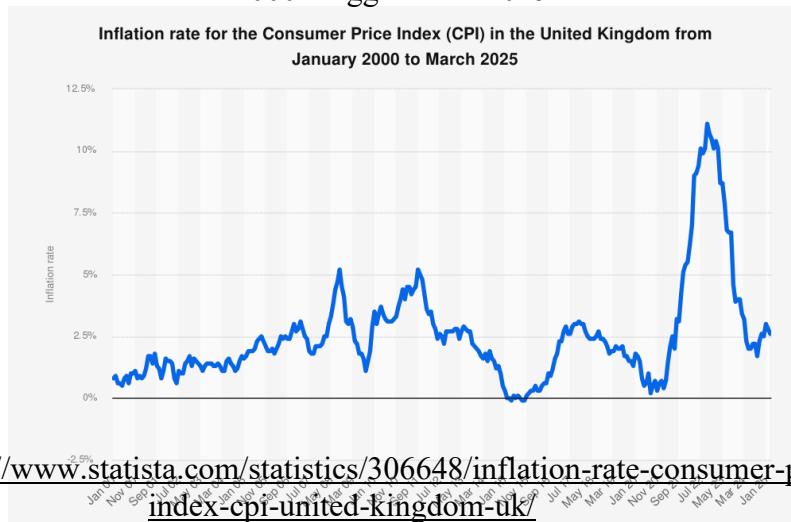
Namun, akhirnya dengan penuh pertimbangan Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020. Terdapat beberapa faktor yang melandasi keputusan ini. Faktor pertama dan yang paling mencolok adalah isu imigrasi. Selama beberapa tahun terakhir, Inggris menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah imigran yang datang ke Inggris, terutama dari negara-negara anggota Uni Eropa, seperti Polandia dan Rumania. Banyak pendukung Brexit merasa bahwa tingginya imigrasi ini mengancam lapangan pekerjaan, menyebabkan tekanan pada layanan kesehatan, dan menciptakan masalah keamanan. Mereka menginginkan kontrol yang lebih ketat terhadap siapa yang dapat datang ke Inggris.

Faktor kedua, adalah kedaulatan nasional. Beberapa pendukung Brexit merasa bahwa keanggotaan Inggris di Uni Eropa mengorbankan kemandirian dan kedaulatan nasional. Mereka berpendapat bahwa banyak keputusan penting tentang hukum, regulasi, dan perdagangan dibuat di tingkat UE, dan Inggris tidak memiliki kontrol penuh atas kebijakan-kebijakan tersebut. Faktor ketiga, adalah rasa ketidakpuasan terhadap regulasi Uni Eropa. Menurut sebagian orang di Inggris regulasi ekonomi Uni Eropa, seperti yang berlaku untuk bisnis dan perdagangan, terlalu rumit dan membebani. Faktor keempat, yaitu adanya sentimen nasionalisme. Hal ini membuat pendukung Brexit merasa bahwa Inggris akan lebih baik jika mempertahankan identitas nasional mereka dan menjalankan kebijakan-kebijakan

yang lebih independen. Sentimen ini seringkali mencakup kebanggaan akan sejarah, budaya, dan tradisi nasional, serta keyakinan bahwa Inggris mampu mengelola urusan mereka sendiri tanpa campur tangan eksternal (Etania & Indriawati, 2023).

Walaupun Masyarakat Inggris berhasil membuat negara tersebut keluar dari Uni Eropa melalui referendum dimana 51% warganya menyetujui kebijakan Brexit, namun hal ini tentu memiliki dampak pada berbagai sektor (UMY, 2016). Beberapa diantaranya yaitu sektor ekonomi dan pangan. Pada sektor ekonomi, Inggris mengalami inflasi yang terjadi sejak 2021 yang berlanjut hingga 2025. Walaupun keadaan ekonomi Inggris sudah mulai pulih, namun inflasi yang terjadi sebelumnya masih berdampak pada sektor pangan, karena korelasi kedua sektor tersebut cukup kuat.

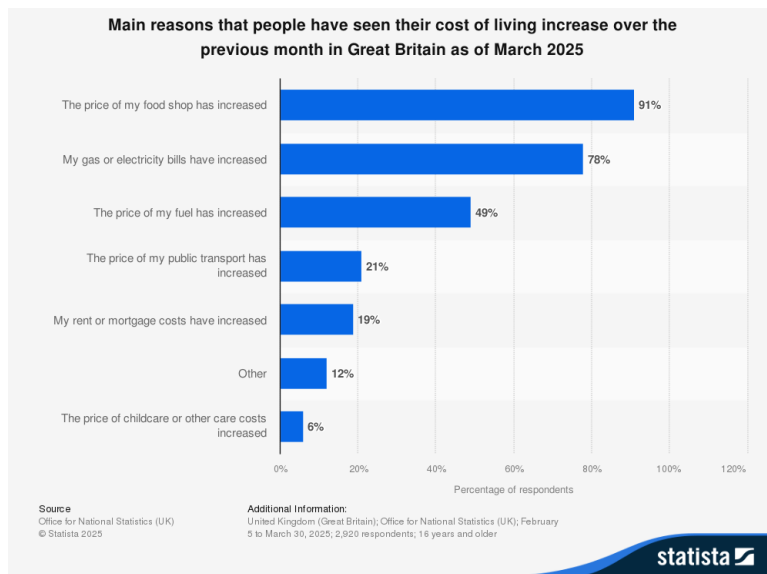
Gambar 1. Tingkat Inflasi untuk Indeks Harga Konsumen di Inggris Raya dari Januari 2000 hingga Maret 2025



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/306648/inflation-rate-consumer-price-index-cpi-united-kingdom-uk/>

Tingkat inflasi di Inggris sebesar 2,6% pada Maret 2025, turun dari 2,8% pada bulan sebelumnya, dan 3% pada Januari. Sementara itu, pada Oktober 2022 hingga Maret 2023, Inggris mengalami tujuh bulan inflasi yang mencapai angka dua digit. Puncaknya yaitu pada Oktober 2022 yang mencapai 11,1%. Karena periode panjang inflasi tinggi ini, harga barang konsumsi di Inggris telah meningkat lebih dari 20% dalam tiga tahun terakhir. Tingginya inflasi merupakan salah satu faktor utama di balik Krisis Biaya Hidup yang sedang berlangsung di Inggris walaupun sudah sedikit mereda pada tahun 2024. Namun, hal ini masih berdampak pada rumah tangga hingga tahun 2025.

Gambar 2. Alasan utama mengapa orang-orang mengalami peningkatan biaya hidup selama bulan sebelumnya di Inggris Raya pada Maret 2025



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1304937/great-britain-reasons-for-cost-of-living-increase/>

Sebagai contoh, pada Maret 2025 dimana sebanyak 91% rumah tangga di Inggris Raya yang melaporkan adanya kenaikan biaya hidup menyatakan bahwa tagihan untuk biaya pangan mereka meningkat. Sementara sebanyak 78% melaporkan kenaikan tagihan gas atau listrik. Diikuti dengan 49% meyakini bahwa tagihan biaya bahan bakar juga meningkat. Jika melihat dari angka statistiknya, mayoritasnya melaporkan kenaikan tagihan biaya pangan. Hal ini terbukti bahwa inflasi yang terjadi memiliki pengaruh pada kerentanan pangan yang terjadi pada suatu negara.

Tidak hanya itu, Survei YouGov oleh *Food Foundation* menemukan bahwa pada April 2022, 15,5% dari semua rumah tangga Inggris mengalami kerawanan pangan. Mereka harus memilih antara makan lebih sedikit atau pergi sehari tanpa makan karena mereka tidak dapat mengakses atau membeli makanan (Brigid Francis-Devine, Yago Zayed, Aleksandra Gorb, Xameerah Malik, dan Shadi Danechi, 2022). Selain itu, anak-anak juga sangat mengalami kelaparan sehingga mereka makan karet atau bersembunyi di taman bermain karena mereka tidak mampu membeli makan siang, menurut laporan dari kepala sekolah di seluruh Inggris (Anna Fazackerley, 2022).

Dengan uraian latar belakang di atas, penulis berupaya menganalisis implikasi yang terjadi pasca kebijakan Brexit diluncurkan pada sektor kerentanan pangan yang sedang terjadi di Inggris Raya. Kerentanan pangan tentunya memiliki faktor internal serta eksternal yang menjadi penyebab dinamika sosial ini terjadi. Dengan menggunakan teori keamanan non-tradisional sebagai mata pisau untuk memberikan jawaban dari penelitian, maka diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk mengetahui tantangan dari suatu kebijakan internasional dari suatu negara.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan tipe penelitian metode deskriptif. Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif adalah metode yang menyelidiki status sekelompok

orang, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, Gambaran atau lukisan yang sistematis, berdasarkan fakta dan akurat tentang fakta, ciri - ciri dan keterkaitan fenomena yang diselidiki. Jenis metode deskriptif yang akan digunakan yaitu, studi kasus. Menurut Maxfield (1930: 117 - 122) dalam Nazir (1988: 66) definisi penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat - sifat serta karakter - karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat - sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Analisa data dalam jurnal ini menggunakan jenis analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif memiliki pengertian suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola - pola (hubungan) diantara banyak kategori (Mc. Milla & Schumacher, 2001). Kualitatif tidak menggunakan angka-angka dan model matematika lainnya. Konsep dasar penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji dan memahami pentingnya individu atau kelompok orang dalam memecahkan masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009: 4). Creswell (2009) juga menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya yang signifikan seperti mengajukan pertanyaan dan pengukuran, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik tertentu ke topik tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian kualitatif berakar pada lingkungan alam secara keseluruhan, bergantung pada manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, melakukan analisis data secara induktif, mengarahkan tujuan penelitiannya mencoba menemukan teori dari fondasinya, bersifat deskriptif, lebih terkait dengan proses dari pada hasil, membatasi fokus penelitian, memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rencana penelitian adalah pendahuluan, dan hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak : peneliti dan subjek peneliti (Moleong, 2010).

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah dokumen atau studi pustaka. Dokumen atau studi Pustaka adalah metode dimana pengambilan sumber materi berasal dari berbagai laporan suatu peristiwa sebelumnya yang dianggap relevan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Ancaman Keamanan Non-Tradisional dalam Kerentanan Pangan di Inggris Raya***

Dinamika hubungan antar negara telah mengalami perubahan cepat dan kompleks. Berakhirnya Perang Dingin, pesatnya kemajuan teknologi informasi serta globalisasi tidak saja telah mendorong perubahan tatanan internasional, melainkan juga melahirkan tantangan, agenda, aktor dan ancaman baru dalam hubungan internasional. Maka dari itu, terdapat beberapa studi mengenai keamanan yang menjadi perdebatan panjang bagi para ilmuwan hubungan internasional.

Beberapa dari mereka menganggap wilayah cakupan dari “keamanan” hanya meliputi negara dan usahanya untuk bertahan dan menghadapi negara lain, pandangan ini disebut dengan “keamanan tradisional”.

Tetapi sebagian ilmuwan yang lain memandang dunia telah berkembang sehingga konsep tentang keamanan tidak hanya meliputi aktor negara saja, melainkan berfokus kepada aktor non-negara beserta ancaman non-militer atau lebih dikenal sebagai “keamanan non-tradisional”. Menurut Barry Buzan, Isu-isu dari keamanan non-tradisional tidak hanya mengancam keamanan serta kedaulatan suatu negara, lebih dari itu isu ini dapat mengancam masyarakat, kelompok, ataupun individu (Buzan, Wilde, & Wæver, 1997).

Masalah keamanan non-tradisional merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang terutama muncul dari sumber-sumber non-militer. Ancaman non-tradisional juga bersifat transnasional, yang tidak dapat diatasi dengan upaya hukum sepihak dan memerlukan tanggapan yang komprehensif secara politik, ekonomi, sosial dan penggunaan kekuatan militer secara kemanusiaan. Beberapa jenis dari ancaman non-tradisional yaitu perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi tidak teratur, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, kejahatan transnasional, dan kerentanan pangan.

Salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang berjenis kerentanan pangan sedang terjadi di Inggris. Kerentanan pangan dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan dimensi akses, ketersediaan, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Dari sisi akses, indikator yang digunakan antara lain persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta proporsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Dalam hal ketersediaan, tingkat produksi pangan domestik, ketergantungan terhadap impor, serta kapasitas cadangan pangan nasional menjadi penentu utama. Stabilitas pangan dinilai melalui volatilitas harga pangan, dampak krisis ekonomi atau politik, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Sementara itu, pemanfaatan pangan mencakup tingkat malnutrisi seperti stunting dan wasting, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap zat gizi. Efisiensi sistem distribusi pangan dan keberadaan program bantuan seperti food bank juga menjadi indikator tambahan yang mencerminkan kapasitas suatu negara dalam merespons kerentanan pangan.

#### ***Faktor Internal dari Kebijakan Brexit terhadap Kerentanan Pangan***

Brexit adalah nama yang diberikan oleh media untuk keluarnya Inggris dari UE, yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2020. Hal ini terjadi setelah referendum nasional mengenai keanggotaan UE pada tahun 2016, di mana 51,9% dari mereka yang berpartisipasi memilih untuk meninggalkan UE, dan 48,1% memilih untuk tetap tinggal. Saat ini Inggris Raya tengah mengalami ketidakstabilan politik-ekonomi sebagai tantangan masa transisi. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap biaya hidup serta nilai riil upah di Inggris sebelum penarikan diri. Pemungutan suara tersebut menyebabkan depresiasi nilai sterling secara signifikan sehingga berdampak pada peningkatan harga konsumen, terutama pada kelompok produk dengan pangsa impor yang lebih tinggi, seperti pakaian dan alas kaki, serta makanan dan minuman.

Kebijakan Brexit membuat perubahan pula pada sistem ekonomi Inggris dari yang sebelumnya terbuka terutama untuk lingkup Eropa menjadi sistem negara. Dari hal ini tentu saja perubahan orientasi ekonomi luar negeri Inggris terjadi. Seperti, peraturan perdagangan dengan negara Uni Eropa menjadi lebih tertutup dari yang sebelumnya bebas sesama anggota Uni Eropa. Krisis ekonomi di kawasan integritas Eropa pada tahun 2008 sampai 2009 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara Eropa dan juga meningkatkan angka pengangguran di negara-negara Eropa tidak terkecuali, Inggris (Saviar, 2017). Adanya krisis ekonomi di kawasan Eropa ini dinilai Inggris sebagai ketidakmampuan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan sebagai organisasi regional yang ada.

Alasan ini pula yang menjadi dasar Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, Inggris memberlakukan Brexit guna menjaga stabilitas ekonomi yang ada didalam negeri. Namun, pasca referendum Brexit justru aktivitas bisnis di Inggris mengalami penurunan paling tajam sejak referendum. Setelah referendum Brexit resmi pada 1 Februari 2020, Bank of England menyatakan bahwa pada awal bulan Mei 2020 ekonomi Inggris bisa menyusut 14% tahun ini dan akan menjadi kontraksi tahunan terbesar sejak penurunan 15% pada tahun 1706, berdasarkan estimasi terbaik bank atas data historis.

Dengan kata lain, pada masa perdana Inggris keluar dari Uni Eropa di awal tahun 2020, Inggris mengalami pemerosotan pertumbuhan ekonomi. Mata uang Inggris telah turun lebih dari 8% menjadi kurang dari \$1,22 dan juga telah jatuh lebih dari 5% terhadap Euro. Hal ini membuat sebagian masyarakat Inggris yang tadinya menilai kebijakan Brexit merupakan keputusan yang tepat menjadi berbalik arah. Brexit dinilai justru menjadi *boomerang* sendiri bagi Inggris, dimana keputusan untuk keluar dari Uni Eropa menjadi tantangan bagi Inggris dalam sektor ekonomi yang sangat berkorelasi dengan sektor pangan. Mengingat nilai ekspor Inggris lebih di dominasi oleh negara anggota Uni Eropa.

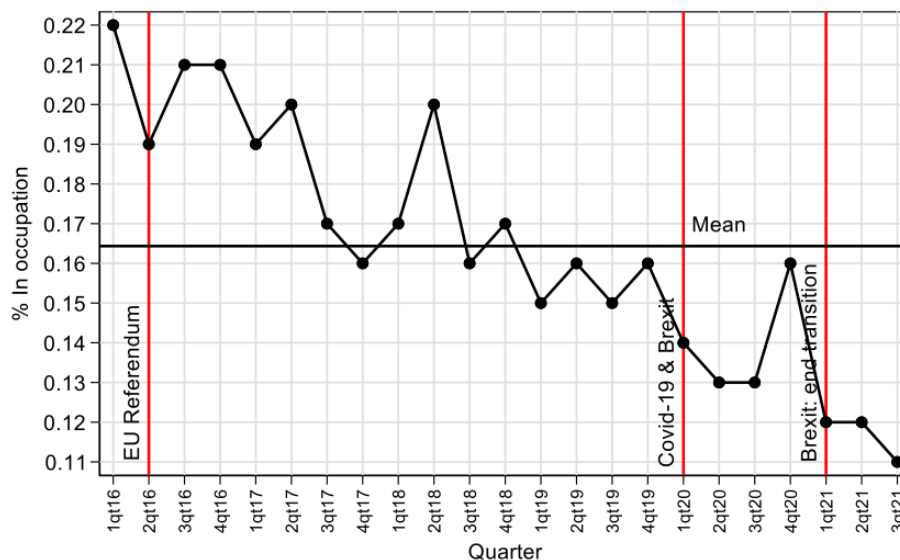
Selain itu, salah satu studi yang dilakukan oleh HM Treasury juga menunjukkan ekonomi Inggris akan tumbuh lebih lambat setelah Brexit. Hal ini diprediksikan mulai dari penurunan output sebesar 18% pada tahun 2030 dalam ekonomi global, jika dibandingkan dengan saat masih menjadi anggota Uni Eropa (Tetlow & Stojanovic, 2018). Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa membuat Inggris mengalami kerugian terlebih pada saat pandemi sedang marak terjadi. Inggris yang sangat terintegritas dengan Uni Eropa dan keterkaitan itu menjadi sangat penting ditengah pandemi yang melanda.

Berhubungan dengan situasi ekonomi Inggris yang tengah menurun, terdapat 112 sumber literatur ilmiah dengan data kuantitatif sebagai bahan pendukung dari Departemen Lingkungan, Pangan & Urusan Pedesaan (DEFRA), Economist Impact, Kantor Statistik Nasional, dan Statistik Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menganalisis bahwa Brexit juga merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan Inggris Raya mengalami kerentanan pangan. Dari hasil penelitian tersebut, didapati argumen bahwa Brexit telah mengganggu ketahanan dan standar pangan Inggris dengan cara mengubah hubungan perdagangan internasional, mengalihkan dukungan publik untuk para petani, serta merumuskan kembali kebijakan pangan di bawah model neoliberalisme yang baru. Studi ini menyoroti bahwa meskipun Brexit bertujuan untuk merebut kembali kendali

nasional, hal ini justru membuat sistem pangan lebih rentan, termasuk ketergantungan pada pangan impor yang berpotensi memiliki standar keamanan yang lebih rendah (Sidharthan, 2025).

Analisis mendalam menunjukkan bahwa tingkat swasembada pangan Inggris masih rendah, terutama dalam produksi buah dan sayur segar. Perjanjian perdagangan pasca-Brexit berisiko membuka jalan bagi masuknya makanan murah dan berkualitas rendah ke Inggris, menciptakan sistem pangan "dua tingkat" di mana makanan berkualitas tinggi diekspor sementara produk dengan standar rendah dijual di dalam negeri. Para petani juga menghadapi tantangan seperti berkurangnya dukungan finansial (misalnya penghapusan pembayaran langsung di Inggris), tuntutan lingkungan yang lebih ketat, ketidakpastian mengenai perubahan aturan pajak dan skema pertanian, serta kekurangan tenaga kerja yang signifikan, khususnya di sektor hortikultura.

Gambar 3. Evolusi pekerjaan: Pekerja pertanian



Source: Quarterly UK-LFS 2016-2021. Own calculations (weighted data).

Sumber: [https://www.food.gov.uk/research/impact-of-labour-shortages-labour-shortages-in-uk-food-systems#:~:text=The%20shortages%20are%20most%20acute%20in%20seasonal,low%20earnings%20and%20the%20location%20of%20farms.&text=According%20to%20the%20British%20Retail%20Consortium%20\(BRC\),the%20lifting%20of%20COVID%2D19%20restrictions%20in%20mid%2D2021](https://www.food.gov.uk/research/impact-of-labour-shortages-labour-shortages-in-uk-food-systems#:~:text=The%20shortages%20are%20most%20acute%20in%20seasonal,low%20earnings%20and%20the%20location%20of%20farms.&text=According%20to%20the%20British%20Retail%20Consortium%20(BRC),the%20lifting%20of%20COVID%2D19%20restrictions%20in%20mid%2D2021)

systems#:~:text=The%20shortages%20are%20most%20acute%20in%20seasonal,low%20earnings%20and%20the%20location%20of%20farms.&text=According%20to%20the%20British%20Retail%20Consortium%20(BRC),the%20lifting%20of%20COVID%2D19%20restrictions%20in%20mid%2D2021

Dalam grafik diatas, terlihat bahwa evolusi pekerjaan di sektor pertanian Inggris menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan, terutama dalam subsektor hortikultura yang sangat bergantung pada tenaga kerja musiman asing. Dampak Brexit, ditambah faktor eksternal lainnya, telah memperburuk situasi, sementara respons kebijakan sejauh ini belum cukup efektif untuk menstabilkan jumlah pekerja. Hal ini tentunya akan menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan sektor pertanian Inggris.

Akibatnya, harga pangan di Inggris melonjak naik. Menurut, Data Kantor Statistik Nasional (ONS) mencatat bahwa peningkatan terjadi pada beberapa jenis

salad dan sayuran. Keterbatasan stok menyebabkan supermarket melakukan penjatahan. Tidak hanya itu, warga Inggris juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk menikmati satu porsi sarapan lengkap yang berisi telur mata sapi, sosis, salad sayur, bacon (daging asap) dan kacang merah. Biaya rata-rata bahan untuk membuat sarapan tradisional ini harus melonjak hampir 23% dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu mengancam keamanan pangan, karena terbukti bahwa setengah dari rumah tangga Inggris mengurangi jumlah makanan. Menurut kelompok konsumen *Which?* berdasarkan survei terhadap 3.000 orang, banyak responden yang merasa lebih sulit untuk makan sehat, sementara hampir 80% mengalami kesulitan secara finansial.

### ***Faktor Eksternal yang Mendukung Kerentanan Pangan di Inggris***

Selain kebijakan luar negeri yang diambil Pemerintah Inggris menjadi penyebab kerentanan pangan, terdapat juga beberapa faktor eksternal yang mendukung ancaman kerentanan pangan terjadi di Inggris. Institute of Grocery Distribution (IGD) menyatakan, Inggris menghadapi kenaikan harga pangan hingga 15% pada musim panas tahun 2023 lalu. Tekanan biaya hidup di Inggris tersebut disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, yang mana hal ini merupakan yang tertinggi sejak era 1970an. Mengutip dari *The Guardian*, IGD menjelaskan Rusia dan Ukraina adalah produsen biji-bijian utama di dunia. Mereka menyumbang hampir 30% pasokan gandum dunia. Jenis makanan yang harganya naik cukup tinggi di Inggris adalah produk yang menggunakan biji-bijian secara langsung, seperti roti. Kemudian produk yang terbuat dari hewan yang diberi makan biji-bijian, seperti ayam.

Naiknya harga makanan juga disebabkan oleh naiknya harga energi. Menurut statement dari IGD, banyak sektor pertanian sangat intensif energi. Naiknya harga pupuk hingga 3 kali lipat sejak tahun lalu, juga menyumbang kenaikan harga pangan. Selain itu, banyak foil dan pulp kayu yang digunakan untuk kemasan makanan biasanya berasal dari Rusia dan perang telah menaikkan harga kemasan bahan-bahan tersebut. Naiknya harga makanan dan energi akibat perang dirasakan oleh banyak negara dan bukan hanya Inggris. Namun, Inggris Raya menghadapi masalah khusus, yaitu kekurangan tenaga musiman untuk panen. Biasanya, Inggris mendapatkan Pekerja Pertanian Musiman mayoritas berasal dari Ukraina. Tetapi tahun ini, pria Ukraina berusia antara 18 dan 60 tahun telah diperintahkan untuk tinggal di rumah dan berjuang.

Tidak hanya itu, Inggris juga berjuang untuk menghadapi kelangkaan pangan yang terjadi akibat cuaca buruk. Pemerintah Inggris menyalahkan penyebabnya pada kondisi cuaca ekstrem di Spanyol dan Afrika Utara, sebagai importir buah dan sayur. British Retail Consortium (BRC), asosiasi perdagangan yang mewakili pengecer Inggris mengatakan bahwa kekurangan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu hingga musim tanam Inggris dimulai pada musim semi, memberi toko sumber pasokan alternatif. Cuaca yang sangat dingin di Spanyol, banjir di Maroko dan badai yang sangat mengganggu pengangkutan barang hanya beberapa alasan mengapa Inggris mengalami kekurangan buah dan sayuran.

Selama musim dingin, Inggris mengimpor sekitar 95% tomat dan 90% selada dari Spanyol dan Afrika Utara. Namun, Inggris juga mengalami kondisi cuaca ekstrem. Gelombang panas pada awal tahun meraih rekor musim panas

terpanas keempat, dengan suhu melebihi 40 derajat celcius untuk pertama kalinya. Namun pada bulan Desember, negara itu dilanda serangkaian cuaca beku yang parah dan berkepanjangan. Hal ini mempersulit Inggris untuk bergantung pada produsen lokal atau bahkan di Belanda, salah satu mitra perdagangan makanan utamanya. Karena kenaikan harga listrik, petani di kedua negara terpaksa mengurangi penggunaan rumah kaca mereka dan memusatkan upaya mereka pada tanaman musim dingin.

Hal tersebut merupakan imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina. Belanda terpuuk keras oleh krisis energi. Energi mencapai 200% lebih mahal pada September dibandingkan bulan yang sama tahun lalu dibandingkan dengan 151% di bulan Agustus, ungkap laporan Statistik Belanda pada Oktober. Belanda, yang merupakan ekonomi terbesar kelima di Uni Eropa (UE), sedang mencoba mengakhiri ketergantungannya pada gas Rusia dan sekarang memiliki salah satu tingkat inflasi tertinggi di Eropa, pada satu titik melampaui 17%.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Brexit membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya kerentanan pangan di Inggris. Dengan menggunakan pendekatan teori keamanan non-tradisional, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan politik yang bersifat unilateral seperti Brexit dapat menciptakan tekanan besar terhadap sektor-sektor vital, terutama pangan. Ketidakstabilan ekonomi, penurunan nilai mata uang, inflasi, dan perubahan sistem perdagangan pasca-Brexit menyebabkan terganggunya distribusi dan akses terhadap pangan, serta melemahkan dukungan terhadap sektor pertanian domestik.

Selain faktor internal, dinamika eksternal seperti perang Rusia-Ukraina, krisis energi, dan perubahan iklim turut memperparah situasi ketahanan pangan di Inggris. Ketergantungan tinggi pada impor pangan serta menurunnya tenaga kerja pertanian akibat pembatasan imigrasi semakin menghambat produksi pangan nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap isu keamanan non-tradisional dalam merumuskan kebijakan nasional, karena stabilitas pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan sosial dan keberlangsungan hidup masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Fazackerley (2022). *Schools in England warn of crisis of 'heartbreaking' rise in hungry children*. Retrieved from theguardian.com: <https://www.theguardian.com/business/2022/sep/25/schools-in-england-warn-of-crisis-of-heartbreaking-rise-in-hungry-children>
- Arianto, B. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia*. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 106 -126.
- Arman Jumadi, Asep Agung Gumelar, Fawaz Maliki Habib, Hamdan Basirun, Muhammad Alek Nurdian, Muhammad Ridza F, (2016). *Perekonomian Negara Inggris*. Retrieved from academia.edu: [https://www.academia.edu/30441795/Makalah\\_Perekonomian\\_Negara\\_Inggris](https://www.academia.edu/30441795/Makalah_Perekonomian_Negara_Inggris)

- Bakrie, C. R., Delanova, M. O., & Yani, Y. M. (2022). PENGARUH PERANG RUSIA DAN UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA. *Jurnal Caraka Prabu*, 65-86.
- BBC News. (2020, Mei 20). UK borrowing at record high as virus cost soars in April. Retrieved from [bbc.com: https://www.bbc.com/news/business-52766487](https://www.bbc.com/news/business-52766487)
- Brigid Francis-Devine, Yago Zayed, Aleksandra Gorb, Xameerah Malik, Shadi Danechi (2022). Food poverty: Households, food banks and free school meals.
- CNBC Indonesia. (2019, November 07). IMF: Kondisi Ekonomi Eropa 2019 Buram. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191107135210-8-113451/imf-kondisi-ekonomi-eropa-2019-buram](https://www.cnbcindonesia.com/news/20191107135210-8-113451/imf-kondisi-ekonomi-eropa-2019-buram)
- D. Clark (2022). UK GDP-Statistics and Facts. Retrieved from [statista.com: https://www.statista.com/topics/3795/gdp-of-the-uk/#topicOverview](https://www.statista.com/topics/3795/gdp-of-the-uk/#topicOverview)
- Danur Lambang Pristiandaru (2022). Daftar Negara Maju dan Negara Berkembang di Eropa. Retrieved from [internasional.kompas.com: https://internasional.kompas.com/read/2022/02/09/163100170/daftar-negara-maju-dan-negara-berkembang-di-eropa](https://internasional.kompas.com/read/2022/02/09/163100170/daftar-negara-maju-dan-negara-berkembang-di-eropa)
- Endy Anatta Pammasena (2017). KEPENTINGAN INGGRIS KELUAR DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA TAHUN 2016, *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 hlm 1-14.
- Expatica (2022). British taxes: a guide to the UK tax system. Retrieved from [Expatica.com: https://www.expatica.com/uk/finance/taxes/a-complete-guide-to-the-uk-tax-system-758254/](https://www.expatica.com/uk/finance/taxes/a-complete-guide-to-the-uk-tax-system-758254/)
- Faqihah M Itsnaini (2021). Krisis Ekonomi: Penyebab dan Dampaknya bagi Suatu Negara. Retrieved from [detik.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5545142/krisis-ekonomi-penyebab-dan-dampaknya-bagi-suatu-negara](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5545142/krisis-ekonomi-penyebab-dan-dampaknya-bagi-suatu-negara)
- Fazackerley, A. (2022, September 25). Schools in England warn of crisis of 'heartbreaking' rise in hungry children. Retrieved from [theguardian.com: https://www.theguardian.com/business/2022/sep/25/schools-in-england-warn-of-crisis-of-heartbreaking-rise-in-hungry-children](https://www.theguardian.com/business/2022/sep/25/schools-in-england-warn-of-crisis-of-heartbreaking-rise-in-hungry-children)
- Febby Saraswati (2021). Mari Lebih Mengenal Benua Eropa. Retrieved from [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/humaniora/434452/mari-lebih-mengenal-benua-eropa](https://mediaindonesia.com/humaniora/434452/mari-lebih-mengenal-benua-eropa)
- Hubunganinternasional.com (2021). Sejarah Singkat Uni Eropa dan Tujuan di dirikannya Uni Eropa. Retrieved from [hubunganinternasional.com: https://www.hubunganinternasional.com/2021/05/sejarah-singkat-uni-eropa-dan-tujuan-di.html](https://www.hubunganinternasional.com/2021/05/sejarah-singkat-uni-eropa-dan-tujuan-di.html)
- Ilham Choirul Anwar (2022). Profil Inggris Salah Satu Contoh Negara Maju di Dunia. Retrieved from [tirto.id: https://tirto.id/profil-inggris-salah-satu-contoh-negara-maju-di-dunia-gpkl](https://tirto.id/profil-inggris-salah-satu-contoh-negara-maju-di-dunia-gpkl)
- Itsnaini, F. M. (2021, April 24). Krisis Ekonomi: Penyebab dan Dampaknya bagi Suatu Negara. Retrieved from [detik.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5545142/krisis-ekonomi-penyebab-dan-dampaknya-bagi-suatu-negara](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5545142/krisis-ekonomi-penyebab-dan-dampaknya-bagi-suatu-negara)

- Karen Winsdel Dinly Pieris, (2015). Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Depedensi dan Gender (Women in Development), *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 8 No.1 hlm 1-13.
- KOMAH. (2021, Agustus 24). MENGENAL BREXIT OLEH INGGRIS. Retrieved from komahi.uai.ac.id: <https://komahi.uai.ac.id/mengenal-brexit-oleh-inggris/>
- Kultsum, F., & Wiyanarti, E. (2018). Dinamika Inggris Dan Uni Eropa : Intergrasi Hingga Brexit. *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 163-174.
- Lynge Nielsen (2011). Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done, IMF Working Paper. Retrieved from imf.org: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Classifications-of-Countries-Basedon-their-Level-of-Development-How-it-is-Done-and-How-it-24628>
- May, E. (2016, Juni 23). Apakah Itu Brexit? Apa Dampak ke Indonesia. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/market-research/d-3240174/apakah-itu-brexit-apa-dampaknya-ke-indonesia>
- Munzlin, K., Muhammadiyah, A., & Program, A. (2020). Brexit : Eurosceptic Victory In British Referendum In Term Of Britain Membership Of European Union. *ARISTO : Sosial Politik Humaniora.*, 1-21.
- Nasrudin, A. (2022, April 13). Brexit: Definisi, Alasan dan Dampaknya. Retrieved from cerdasco.com: <https://cerdasco.com/brexit/>
- Novia Aisyah (2022). Siapakah Uni Eropa? Ini Definisi, Sejarah, Daftar Anggota, dan Bahasanya. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5964468/siapakah-uni-eropa-ini-definisi-sejarah-daftar-anggota-dan-bahasanya>
- Rangga Eka Sakti (2019). Bagaimana Dampak Brexit bagi Perdagangan Inggris?. Retrieved from kompas.id: [https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/30/bagaimana-dampak-brexit-bagi-perdagangan-inggris/?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/30/bagaimana-dampak-brexit-bagi-perdagangan-inggris/?status=sukses_login&status_login=login)
- Saviar, Y. M. (2017). Mengapa Brexit? Faktor-faktor di Balik Penarikan Inggris dari Keanggotaan Uni Eropa. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 258-271.
- Silviana Kurniawan (2019). Perbandingan Kebijakan Industri Pemerintah Korea Selatan Dalam Menanggulangi Krisis Ekonomi Pada 1997 dan 2008. Retrieved from repository.unpar.ac.id: <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/8446/Cover%20-%20Bab1%20-%20315078sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Tetlow, G., & Stojanovic, A. (2018). Understanding The Economic impact of Brexit. Institute For Government.
- Tommy Patrio Sorongan (2022). Mengenal Krisis Inggris yang Makin Ngeri: Kronologi & 8 Fakta. Retrieved from cnbcindonesia.com <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220930111517-4-376213/mengenal-krisis-inggris-yang-makin-neri-kronologi-8-fakta>
- Vanya Karunia Mulia Putri, (2022). Benua Eropa: Letak Geografis, Keadaan Penduduk, dan Daftar Negaranya. Retrieved from kompas.com:

- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/06/080000169/benua-eropa--letak-geografis-keadaan-penduduk-dan-daftar-negaranya>
- Worldometers, (2022). U.K. Population. Retrieved from worldometers.info: <https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/>
- WTO, (2022). Trade growth to slow sharply in 2023 as global economy faces strong headwinds. Retrieved from wto.org: [https://www.wto.org/english/news\\_e/pres22\\_e/pr909\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr909_e.htm)
- Yulyan Maharta Saviar, (2017). *Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (2). pp. 258-271.
- Yozar Qohari Bil Ikhsan (2019). Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 3, 2019, hal 587-591.